

Cyberbullying dan Pilpres 2014

**Bagian Terakhir
dari Dua Tulisan**

Oleh: Yohanes Widodo

RADHAR juga menulis, yang terjadi adalah sebuah proses internalisasi kekerasan, fisik dan psikis, virtual dan imajinatif, ke dalam diri anak-anak kita secara intens hampir tiada henti (*Kompas*, 30/5/2014). Dengan demikian, fenomena *cyberbullying* dapat jadi merupakan perpanjangan dari *bullying* secara *offline*.

Kedua, dampak media terutama televisi yang cenderung menampilkan pemberitaan pilpres yang bernada permusuhan, argumentatif, dan agresif. Di era Web 2.0 dan budaya partisipatif ini, tak heran jika masyarakat umum merasa perlu terlibat

dalam perilaku tersebut. Ini didukung dengan karakteristik Internet yang memungkinkan pelaku tampil secara anonim, sehingga mereka dapat aman dan merasa bebas dari jerat hukum ketika melakukan praktik *cyberbullying*.

Ketiga, menurut Hardaker (2010), manusia cenderung mencari hiburan dalam konflik, misalnya dalam bentuk olah raga berisiko, *film action*, *games computer*, atau agresivitas bahasa melalui program televisi. Jika selama ini mereka hanya melihat simulasi kekerasan atau konflik maka dengan proteksi anonimitas, pengguna Internet dapat menyerang orang lain se-

cara nyata dengan risiko kecil. Dengan kondisi itu maka perilaku negatif dan *cyberbullying* mendapatkan tempatnya. Ketika melihat konflik politik di media, mereka cenderung berpartisipasi.

Untuk mengatasi fenomena *cyberbullying*, dibutuhkan sebuah pendekatan budaya yakni bagaimana membangun interaksi antarwarga secara *face-to-face* maupun online dapat dilakukan secara beradab, cerdas, dan arif. Semua pihak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus ambil bagian dalam gerakan ini. Dalam konteks pilpres inilah, kecerdasan, keadaban

dan kearifan penggunaan media sosial oleh publik diuji.

Media sosial adalah medium yang baik untuk mempromosikan komunikasi yang baik dan konstruktif. Tantangan bagi pengguna media sosial yakni mereka kaum kelas menengah yang memiliki pengaruh sosial yang kuat - adalah bagaimana membangun perilaku yang baik di ranah Internet dan media sosial.

Capres, cawapres, dan politisi harus mengambil peran utama dalam hal ini. Jika tidak, jangan menyesal jika suatu saat Internet dan media sosial menggembosi dan menggrogoti demokrasi kita. ***

Yohanes Widodo, Dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta.